

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN DELI TUA, KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

WAN NAURAH JULISA

188520016



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN DELI TUA, KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Medan Area

Oleh :

Wan Naurah Julisa

18520016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang

Nama : Wan Naurah Julisa
NPM : 188520016
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Walid Mustafa Sembiring S.Sos, M.IP

Pembimbing I


Drs. H. Irwan Nasution S.pd. M.AP

Pembimbing II

Mengetahui


Dr. Effati Jualiana Hasibuan, M.Si

Dekan Fakultas Fisipol

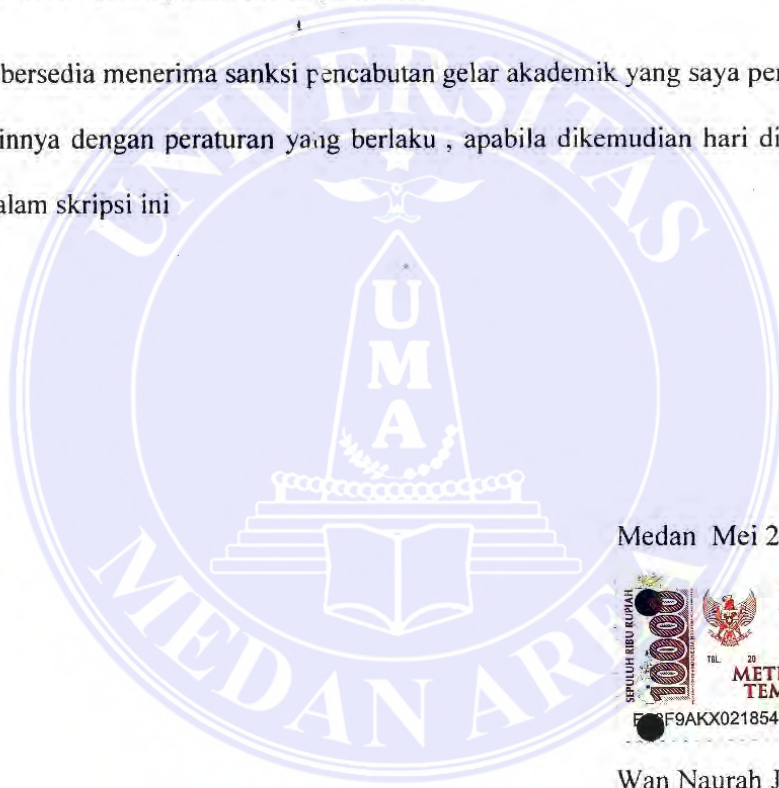

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.P

Kepala Program Studi

Lembar Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan Mei 2022



Wan Naurah Julisa

188520016

Halaman Pernyataan persetujuan publikasi Skripsi untuk kepentingan akademis

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wan Naurah Julisa
NPM : 188520016
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu sosial dan ilmu politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area HAK Bebas Royalti Noneksekutif (non exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang

Beserta perangkat yang Ada (Jika di perlukan) Dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini universitas Medan Area Berhak Menyimpan, mengalih Media/Formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (data Base) merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya

Dibuat di
Medan pada tanggal
02 September 2022

Menyatakan,



Wan Naurah Julisa

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA, KABUPATEN DELI SERDANG

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah suatu Program yang disalurkan dalam bentuk non Tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pembentukan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial serta memberdayakan kelompok masyarakat melalui E-Warung. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada kecamatan deli tua yang difokuskan pada 1 e-warung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Deli Tua, sudah optimal yakni berkaitan dengan sasaran program yang pembagiannya sudah merata akan tetapi masyarakat sudah memahami proses terkait dengan program masyarakat juga sudah mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada e-warung. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat menjadi wirausaha dengan menggunakan modal usaha dari pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan E-warung sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan menambah pendapatan serta meningkatkan perekonomiannya melalui E-warung walaupun Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan E-warung beroperasi namun masih terdapat masalah yang berkaitan dengan administrasi sehingga menyebabkan masih terdapatnya saldo dari KPM yang kosong, pencairan yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan dan jaringan yang lambat pada saat menggesekkan kartu

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemberdayaan

Abstract

The implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is one of the policies contained in the regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Social Assistance. Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a program that is distributed in the form of non-cash to beneficiary families (KPM) every month through an electronic money mechanism that is used to buy food at E-warung with a Prosperous Family Card (KKS) Establishment of a Food Assistance program Non-Cash (BPNT) aims to help fulfill daily food needs and improve the welfare of families receiving social assistance benefits as well as empowering community groups through E-Warung. This study uses a descriptive method with a qualitative approach as well as data collection techniques, interviews, observations and documentation carried out in the old deli district which is focused on 1 e-warung. The results showed that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Deli Tua District was optimal, namely related to program targets whose distribution was evenly distributed, but the community had understood the process related to community programs and was independent in conducting non-cash transactions on e-commerce. shop. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has included and empowered the community to become entrepreneurs by using business capital from the government in managing and developing E-warung so that they become more independent and increase their income and improve their economy through E-warung although the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and E-warung are operating but there are still problems related to administration, causing there to still be empty KPM balances, disbursement that is not according to the specified schedule and slow network when swiping cards

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Assistance (BPNT), empowerment



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wan Naurah Julisa lahir pada 01 Juli 1999 yang sekarang berusia 22 tahun ini merupakan putri kandung dari Bapak Datuk Rifandi SE Dan Ibu Noviar Ramadhani Siregar, S.Sos, Jalan Karya Gg Wonogiri, Kecamatan Medan Barat

Penulis pernah menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak TK Pembina di jalan karya ujung Pada Tahun 2004 selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar, SD Karya Bhakti di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dibangku SMP Karya Bhakti Di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat. Dan penulis melanjutkan pendidkan dibangku SMA 1 labuhan Deli di jalan serbaguna ujung Pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara. Sekarang penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/22

aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Program Studi Administrasi Publik sejak tahun 2018.

Selama berkuliah penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan baik itu organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Penulis Pernah Menjadi Panitia Pesantren Kilat Di SMA Negeri 1 Labuhan Deli serta penulis merupakan anggota PMII di Kampus Universitas Medan Area dan Panitia Bidang Humas Di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Medan Area (HIMAP UMA) Pada tahun 2019-2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “ Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang “skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari beberapa pihak yang telah berpartisipasi. Dengan tersusunnya tugas akhir skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Jualiana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Kepala Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

4. Bapak Walid Mustafa Sembiring, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan penulis arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu
5. Bapak Drs.H.Irwan Nasution, S.Pd, M.AP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan penulis arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Hadiyanti Arini S.Sos, M.AP selaku Panitia dalam skripsi tersebut
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Semua Informan yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh Mahasiswa Administrasi Publik yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kedua orangtua, yang sudah memberikan dukungan penuh serta selalu melangitkan doa-doa untuk keberhasilan penulis dan wujud nyatanya adalah penulis bisa sampai dititik akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya saran, masukan serta kritikan yang membangun guna membantu penulis untuk terus memberikan yang terbaik. Penulis berharap pembaca dapat menerima manfaat serta pengetahuan baru dari karya ilmiah ini.

Medan, Februari 2022

Penulis,

Wan Naurah Julisa

188520016



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pernyataan.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	8
2.1 KONSEP DAN TEORI KEBIJAKAN	8
2.2 UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN PUBLIK	10

2.3 TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK	10
2.4 KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK.....	13
2.5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	14
2.5.1 Model Implementasi George Edward	
III.....	14
2.6 PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)	20
2.7 KERANGKA BERPIKIR.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 JENIS PENELITIAN.....	31
3.2 LOKASI PENELITIAN.....	31
3.3 INFORMAN PENELITIAN	32
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	32
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA	34
3.6 VALIDITAS DATA	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN DELI TUA	37
4.2 VISI DAN MISI KECAMATAN DELI TUA.....	38
4.2.1 VISI KECAMATAN DELI TUA	38
4.2.2 MISI KECAMATAN DELI TUA.....	38
4.3 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DELI TUA	39
4.3.1 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DELI TUA	39
4.4 Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang	46
4.5 Pemberdayaan Masyarakat	59

BAB V PENUTUP	65
5.1 KESIMPULAN.....	65
5.2 SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....74
FORMULIR BIODATA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).

Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri (Adi, 2003).

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai

sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, (Budiman, 2000). Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro) Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dll.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) Di Kabupaten Deli Serdang Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya

belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran

kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Kecamatan Deli Tua menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 69.541 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Mereka terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 14.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 200.000 setiap bulannya,”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui eWarung atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BNI

Saat ini telah tersedia 1 agen yang telah disebar di Kecamatan Deli Tua Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warung. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk

sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Kecamatan Deli Tua lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Amir, 2018)

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pada tahun 2020 nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000.- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000.- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020). Dengan adanya Pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 Pemerintah Kecamatan Deli Tua menyalurkan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang
2. Peran kecamatan Deli Tua dalam menjalankan BPNT ke masyarakat di Kecamatan Del Tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian yang di ajukan mempunyai sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang
2. Peran kecamatan Deli Tua dalam menjalankan BPNT ke masyarakat di kecamatan deli tua

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

1. menambah khazanah ilmunan pengetahuan dan sumbanagan pemikiran bagi kajian Kecamatan Deli Tua dalam Menyalurkan BPNT
2. Bagi para pengembang pengetahuan, Hasil Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai acuan untuk Penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengembangkan Kecamatan Deli Tua, dalam menyalurkan BPNT

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi terkait BPNT

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan membeikan arahan dan kebijakan dalam menanggulangi yang terjadi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki banyak makna. Menurut Hogwood dan Gunnyang dikutip dalam Parsons (2005:15) menyebutkan penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses

Kebijakan diberi arti dari berbagai pendapat para ahli. Menurut seorang pakar Aminullah, (dalam Muhammadi, 2001: 371-372), mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya atau tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.cita yang diharapkan

Dari berbagai kepustakaan, dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik dalam *public policy*, yaitu sebuah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama yang wajib ditaati dan cara untuk mengikat seluruh warganya. Aturan atau peraturan secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik dan kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi seluruh warga harus memahaminya secara benar dan menyeluruh

Menurut Abidin (2004:23), alumni University of Pittsburgh, Pennsylvana, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada

strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan, kebijakan publik adalah suatu sistem nilai yang timbul dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan Akan tetapi, dari semua pernyataan, menurut Abidin (2004:56-59), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria, dapat ditentukan berbagai kebijakan antara lain:

1. Efektivitas, yang dapat mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai sengan suatu alternatif kebijakan untuk dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan.
2. Efisien, adanya dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Cukup, dimana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada.
4. Adil Terjawab, dimana kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu kelompok atau masalah tertentu dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu Lasswell(Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha,2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat.

Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh

masyarakat, dan semuanya yang di pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak di kerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut

Public policy menurut Keban (2004:55) dapat di lihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

Selanjutnya dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang di inginkan
2. Sebagai suatu produk, kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi
3. Sebagai suatu proses, kebijakan di pandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya

2.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006), ada 4 unsur penting dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang baik tentu memiliki tujuan yang baik juga. Tujuan yang baik memiliki tiga kriteria, yaitu pencapaian yang diinginkan, objektif atau realistis, dan dapat berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima di kalangan masyarakat karena terdapat isi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentingan mayoritas dalam masyarakat. Tujuan yang baik itu

masuk akal, memiliki gambaran yang jelas, pola pikir yang luas, dan langkah-langkahnya mudah untuk dipahami. Tujuan yang baik berorientasi ke depan, dalam arti tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan kearah yang diinginkan dan dapat diukur baik dari aspek kuantitatif ataupun kualitatif.

2. Masalah

Masalah merupakan unsur penting dalam suatu kebijakan. Jika salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, maka dapat menimbulkan kegagalan total dalam proses kebijakan. Masalah memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat dan mencakup konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut. Metode pemecahan masalah tidak ada artinya dijelaskan jika seorang analisis kebijakan gagal mengidentifikasi masalah yang ada. Dalam memecahkan masalah harus terdapat alternatif pemecahan masalah yang dijadikan sebagai kebijakan komprehensif berdasarkan sebab-sebab yang multidimensional.

3. Tuntutan (*Demand*)

Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa terjadi karena dua hal, yaitu kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan masalah diabaikan, sehingga kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan akan dianggap merugikan kepentingan masyarakat tersebut, dan munculnya kebutuhan baru setelah suatu masalah selesai diatasi dan tujuan yang dituju telah tercapai.

4. Dampak (*Outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dari ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif, dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.

2.3 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Winamo (2008: 32) Proses pembentukan kebijakan publik adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Dimana para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik yang sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pejabat kebijakan.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari banyaknya alternatif kebijakan yang diterapkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya akan ada salah satu dari alternatif kebijakan-kebijakan yang akan digunakan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan akan menjadi catatan-catatan, jika program yang dirancang tidak jadi diimplementasikan.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.4 Karakteristik Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik akan menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Abidin 2006:41) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik, yaitu:

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembentukan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena ada kesempatan untuk membuatnya.
2. *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decisions or actions, performed by government officials.* Suatu kebijakan tidak akan bisa berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan dapat berkaitan dengan bermacam-macam kebijakan yang berhubungan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum
3. *Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan disebut sebagai sesuatu hal yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan segera dilakukan.
4. *Public policy may be either negative or positive.* Suatu kebijakan dapat bersifat larangan atau dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan suatu kebijakan.

5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Dimana suatu kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi adalah mensukseskan suatu program seperti pengertian implementasi menurut Grindle dalam (Akib, 2012) menjabarkan bahwa: “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 1980).

2.5.1 Model implementasi Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama

administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa “without effective implementation the decision of *policymakers* will not be carried out successfully”. Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam kerangka model implementasi sebagai berikut

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui eksplanasi implementasi kedalam

komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementors dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang

mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan

2. Sumberdaya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka sumberdaya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Bukti dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, Sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur /membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon

implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan polapola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

- b) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- d) Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- e) Vitalitas suatu organisasi
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi

2.6 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan adanya program Raskin. Menurut buku panduan Raskin (2014), Raskin dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk

melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional

Menurut Winarni (Masta, 2016) bantuan beras miskin atau yang biasa disebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu. Kemudian dalam program raskin pada tahun 2015 di ganti menjadi rastra. Alasan mengganti nama raskin menjadi rastra adalah untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kemudian Kementerian Sosial telah mengubah subsidi beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra), dan lebih disempurnakan menjadi bantuan sosial rastra, yang bertujuan lebih memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk semua penerima bantuan sosial rastra, tidak dipungut biaya. Kini berubah nama dari raskin menjadi rastra, dari berbayar ke tidak berbayar.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 pemerintah menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen khusus yang

diberi nama e-warong. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur BPNT. Koordinasi Pelaksanaan :

1. Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2. Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3. Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT

b. Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a. Jumlah pagu Peyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.

- b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
 - c. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur
 - d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota
 - e. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda
 - f. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.
- c. Persiapan e-Warong

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran e-warongdi setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa/ kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama

- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
 - c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM
 - d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 1. Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
 2. Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani
 3. Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
 4. Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
 5. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi
- d. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.

b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.

c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.

2. Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah

a. Kementerian atau Lembaga terkait.

b. Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.

d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya e) Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan e. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.

f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

g) Pemilik atau Pengelola e-warong. h) Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.

3) Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:

a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

b) Bank Penyalur.

c) Pemilik/Pengelola e-warong.

E. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

1) Proses

1 Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

2) Proses

2 Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo.

Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.

3) Proses

3 Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

F. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

1. Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
2. Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
3. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
4. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
5. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
6. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
7. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.

8. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima)
9. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

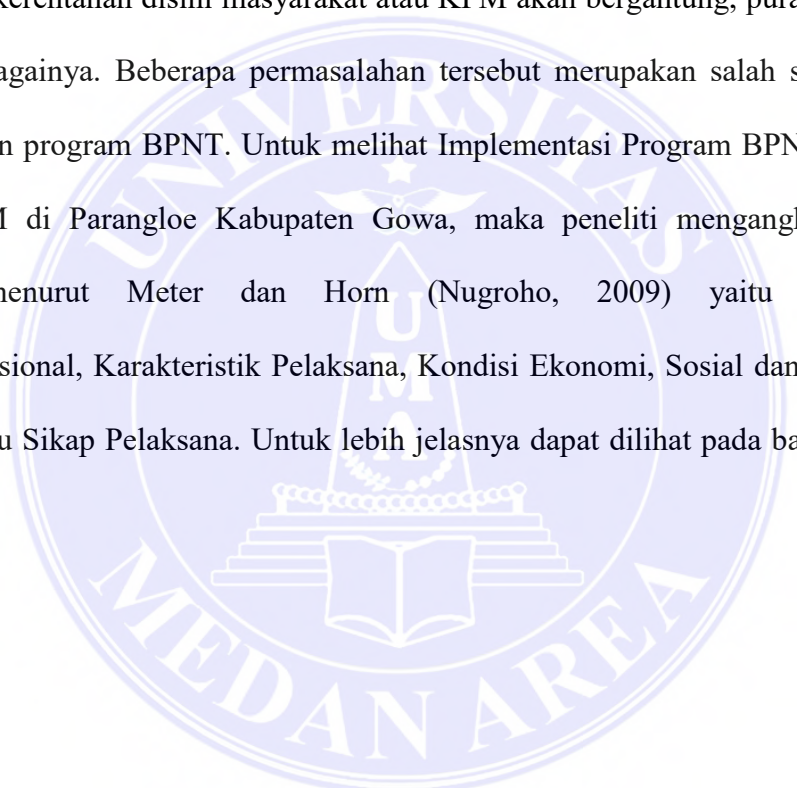
1. Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
2. Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
3. Pilih; Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
4. Terima; Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan

2.7 Kerangka Pikir

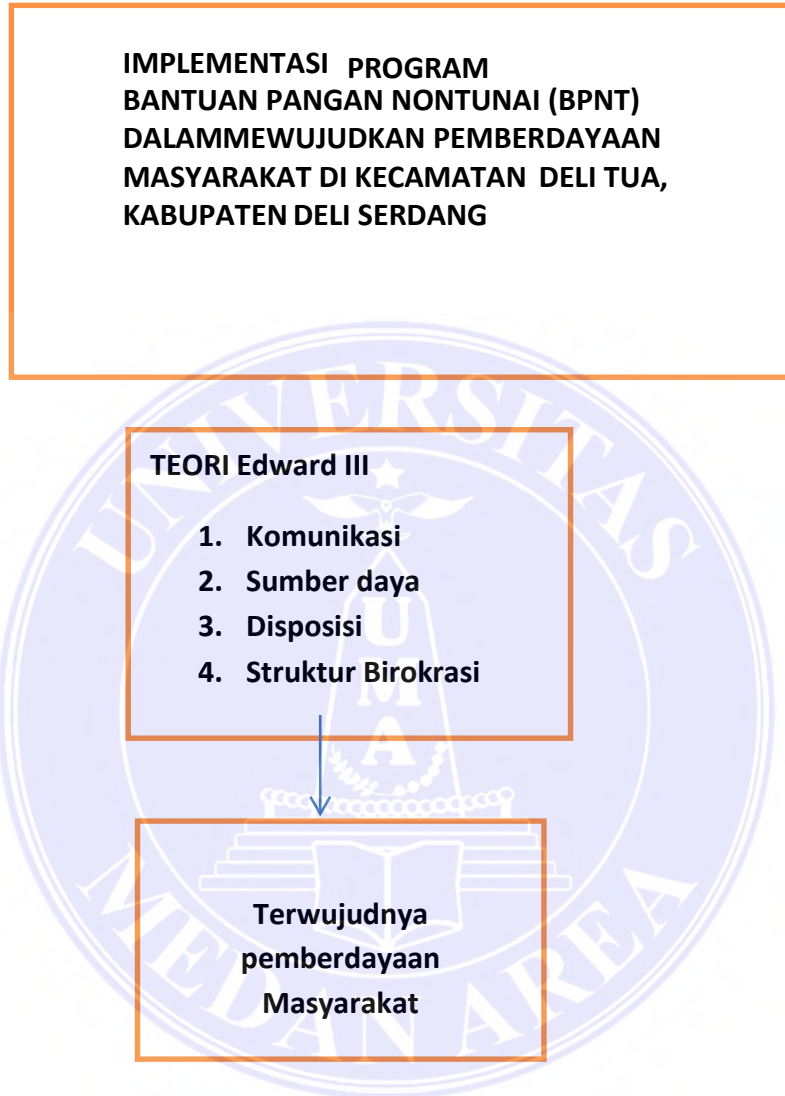
Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berupa persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan pembukaan kartu, penyaluran program dan pemanfaatan program BPNT untuk KPM. Program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis melalui kartu yang didalamnya terdapat Rp.200.000 yang dapat ditukarkan pada e-warong. Tujuan diberikan program BPNT tersebut adalah untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi masyarakat melalui kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan

telur. Akan tetapi program BPNT dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat atau KPM.

Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati terhadap program BPNT. Kebijakan pasti menyebabkan kerentanan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah pasti memiliki tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerentanan disini masyarakat atau KPM akan bergantung, pura-pura miskin dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut merupakan salah satu kerugian dari kebijakan program BPNT. Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Parangloe Kabupaten Gowa, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Dari analisis di atas maka penulis membuat kerangka Berpikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis, pengalaman dan kepekaan terhadap pengumpulan informasi dan wawancara berdasarkan realitas yang ada. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau peristiwa yang spesifik dan sistematis yang berkaitan dengan karakteristik populasi dan wilayah tertentu (Zuriah, 2006: 47). Penelitian deskriptif umumnya tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan dan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis. Dengan demikian, penelitian ini akan memaparkan potret realitas masalah yang diuraikan oleh peneliti berdasarkan data yang ada. Selanjutnya peneliti melakukan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk mengumpulkan informasi mengenai tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan pengaturan dalam pelaksanaan pelaksanaan program bantuan pangan nonmoneter (BPNT).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada kegiatan dan masalah yang terkait dengan judul penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Deli Tua yang menerapkan kebijakan dan telah melaksanakan program terkait bantuan pangan non tunai fokus pada penanganan isu-isu yang muncul dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT)

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian (Bungin, 2011:50). Dalam penelitian kualitatif, topik penelitian yang tercermin dalam objek penelitian ditentukan secara sadar. Subjek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian (Suyanto, 2005: 108).

Pelapor dimaksudkan untuk menjadi seseorang yang benar-benar tahu tentang suatu isu atau masalah tertentu dan dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam bentuk pernyataan, informasi, atau data yang dapat membantu memahami masalah dan masalah tersebut.

Adapun informan dari penelitian ini adalah:

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Tenaga PKH
3. Pengurus e-Warong
4. Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima BPNT

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data ialah catatan atau deskripsi atau gambaran tentang sesuatu atau fakta. Selanjutnya dapat juga diartikan sebagai informasi, berupa gambar atau suara, tentang sesuatu yang nyata, akurat dan dapat dibuktikan. wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk sumber data yang sama (Sugiyono, 2012: 83). Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan data, informasi dan informasi. Untuk itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung di lokasi penelitian untuk menemukan data yang komprehensif terkait dengan masalah yang diteliti. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan bentuk komunikasi atau interaksi peneliti atau subjek penelitian dengan informan untuk mengumpulkan informasi dan data di tempat yang faktual dengan pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, peneliti membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara informan.

b. Observasi

Merupakan suatu bentuk tindakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dan memperoleh gambaran sendiri tentang fakta, kondisi dan keadaan di lokasi penelitian. Dari kegiatan observasi, peneliti kemudian membuat catatan atau gambaran sebenarnya dari lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi fisik dan non fisik yang ada di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Peneliti menetapkan pedoman observasi sebelum melakukan observasi di lokasi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen dan bahan pustaka yang dapat mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- a) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat pedoman dokumentasi sebelum melakukan penelitian di lokasi penelitian.
- b) Studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dari buku, artikel akademik, jurnal, surat kabar, majalah, dan pendapat ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan mengelompokkan dan mengurutkan, memanipulasi dan mengiris data sehingga mudah untuk membuat deskripsi tentang apa saja yang sedang dipelajari. Pendapat Miles dan Huberman didalam Moleong, (2006: 247), ada beberapa langkah dalam analisis data, yaitu:

A. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dari penelitian, mencari tema dengan pola untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan.

B. Penyajian Data

Sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan bertindak. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

C. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang jelas pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diajukan adalah kesimpulan yang kredibel. Dimulai dengan meninjau semua data dan menafsirkannya dengan analisis berdasarkan kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan penelitian.

3.6 Validitas Data

Untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih sempurna, diperlukan validasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah pendekatan penelitian yang menggunakan kombinasi beberapa strategi dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data/informasi. Triangulasi tidak hanya membandingkan data dari sumber data yang berbeda, tetapi juga menggunakan teknik dan metode yang berbeda untuk meneliti dan mengumpulkan data/informasi pada fenomena yang sama (Wirawan, 2011:156).

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Metode ini digunakan untuk menguji kejujuran, subjektivitas dan kemampuan pengumpulan data peneliti lapangan. Perlu adanya triangulasi peneliti dengan meminta peneliti lain melakukan pemeriksaan langsung, menanyai kembali dan mencatat data yang sama di lapangan. Ini sama dengan proses mereview penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi Dengan Sumber Data

Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengukur keandalan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dan menggunakan metode kualitatif yang berbeda.

3. Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk memverifikasi penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang diperoleh dengan metode wawancara sesuai dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diperoleh selama wawancara. Demikian pula, teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data apakah sumber data, ketika ditanyakan dan diamati, memberikan informasi yang sama atau berbeda.

4. Triangulasi Dengan Teori

Ini dapat dilakukan sebagai perbandingan teori, termasuk upaya untuk sampai pada teori dan cara lain untuk mengatur data yang mungkin mengarah pada hasil pencarian yang lebih relevan.

Keempat jenis triangulasi tersebut di atas merupakan cara peneliti menganalisis data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknis dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan selanjutnya verifikasi melalui observasi dan dokumentasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk melihat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui variabel-variabel berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi antar lembaga dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan minimal sebulan sekali. Rakor tersebut membahas pelaksanaan Program Bantuan Sembako (BPNT) di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, serta permasalahan dan hambatan di lapangan terkait Program Bantuan Sembako (BPNT) dengan program terkait lainnya. Para Pihak. Komunikasi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Uang (BPNT) dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian komunikasi yang dilakukan berjalan efektif dalam pelaksanaannya, mengingat adanya koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing badan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sumber Daya Dengan konsep pemberdayaan yang dikaitkan dengan kegiatan Program Bantuan Pangan Non Uang (BPNT), masyarakat penerima manfaat harus dapat membiasakan diri mengembangkan kapasitasnya dan menerima bantuan pangan secara kelompok dalam pelayanan KPM. Dalam hal ini sumber daya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang begitu optimal yaitu pembagian tugas yang diberikan kepada setiap anggota KUBE

pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga mengajarkan dan melatih masyarakat untuk berorganisasi dengan pembagian kerja yang dilaksanakan melalui e-Warong. Dana untuk program tersebut murni bersumber dari APBN. Dana yang disetujui adalah Rp 200.000/bulan untuk KPM. Disposisi Kecenderungan perekrutan pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya sebatas pelaksana yang dibatasi hanya oleh program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang bertanggung jawab atas proses pelaksanaannya. Para pelaksana kebijakan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk terus meningkatkan program-program yang dikembangkan pemerintah menjadi lebih baik. Pelaksana berkomitmen pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) seperti TKSK. Kunjungi website e-Warong setiap bulan untuk memberikan motivasi positif kepada KPM, dan membantu KPM dengan masalah dengan menawarkan solusi. Struktur Birokrasi Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, aspek pertama adalah mekanisme implementasi kebijakan, biasanya telah disusun standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menciptakan prosedur birokrasi yang rumit dan rumit, yang pada gilirannya membuat aktivitas organisasi menjadi kaku.

5.2 Saran

Saran yang dapat dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kecamatan Deli Tua yaitu:

Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) yang belum berdiri dapat didirikan. Artinya, pasokan pangan dari Bulog ke e-Warong bisa langsung dipantau dan dikendalikan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah kabupaten dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan memberikan dana APBD kepada tim pelaksana di lapangan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat. Diharapkan Bank Penyalur BNI dapat mengatasi jaringan yang sering lemot dan lamban dalam menjalankan kartu melalui mesin EDC setiap kali dana bantuan dicairkan, sehingga Keluarga Penerima Bantuan (KPM) dapat menerima bantuan dengan mudah dan lancar tanpa harus untuk menunggu terlalu lama. Masyarakat penerima manfaat yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan lebih bijak sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Amirin, Tatang. 2000. *“Menyusun Rencana Penelitian”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *“Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)”*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Chambers, Robert. 1985. *Rural Development: Putting The Last First*. London:New York.
- Denhardt, Janet V dan Denhardt, Robert B. 2007. *The New Public Service*. America: United States.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *“Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karna, Sobahi. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan di EraOtonomi Daerah*, Bandung: CV. Cakra.
- Kusnadi, dkk. 2005. *Pendidikan Keaksaraan; Filosofi, Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- _____, dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Moloeng J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

_____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya. Nugroho, Riant. 2003. "*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan*

Evaluasi". Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pohan, Aulia. 2011. *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rasyid M, R. 2000. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*.

Jakarta: Yarsif.

Siagian, Matias. 2012. *Kemiskinan Dan Solusi*. Medan: PT Grasindo Monoratama.

Sinambela & Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri. 2008. "*Metode Penelitian Survey*".

Jakarta: LP3ES. Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

Bandung:Refika Aditama.

_____. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.

Bandung:Alfabeta.

_____. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

Bandung:

T.Refika Aditama.

Sulitistyani, Ambar Tegyh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas Tnetang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial:*

Berbagai AlternatifPendekatan. Jakarta: Prenada Media.

_____. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*.

Malang: In-Trans Publishing.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Strategi,dan Kasus)*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Toha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*.

Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin A. 2008. "Pengantar Analisi Kebijakan Publik". Malang:UMM Press.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.

Yogyakarta :Media Pressindo.

Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi)*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan:Teori Aplikasi*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

Callan & Claire Keane. 2009. *Non-Cash Benefits and Distribution of Economic Welfare. Economic and Social Research Institute (ESRI). Jerman.*

Hidayat, Ahmad. 2006.
Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran
Non Tunai Melalui Pengembangan *E-Money*. Bank
Indonesia.

Juahari, Jaidan. 2010. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan *e-Commerce*.". Palembang. Universitas Sriwijaya: Jurnal Sistem Informasi. Vol. 2 No. 1.

Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS Volume.

1. No. 2.

Prihantoro, Satya. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Jurnal Program Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang,

Indonesia.

Siahaan, Asima & Sihombing, Tunggul. (2017). *“Implementing E-Public Service in North Sumatera: Prospect and Challenges”*. Medan. ISSN: 2229-712X.

Skripsi:

Ulan Dari, Delfi. 2018. Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E- Warong KUBE PKH) Pada Dinas Sosial Kota. Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara.

Sakina, Lailan. 2018. Evaluasi Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara.

Sulthany, Arif Eka. 2013. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Suatu Studi di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). Ilmu Administrasi Universitas Jember.

Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Penegelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Yogasulistyo, Handika 2017. Efektivitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kementerian PPN/ Bappenas, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial RI. 2017. “Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai”. Jakarta: Indonesia.

Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.



LAMPIRAN



Foto Bersama penerima KPM



Foto Bersama penerima KPM



Foto Bersama penerima KPM



Foto Bersama penerima KPM



Foto Bersama KPM



Foto Bersama Pemilik E-warung



Pemilik E-warung Mengecek No KPM Tersebut



Foto Bersama KPM yang Belanja



Foto Bersama KPM yang Belanja



Foto Bersama Pemilik E-warung dan KPM yang belanja



Foto Bersama Pemilik E-warung dan KPM di depan Warungnya



Foto Bersama Pemilik E-Warung dan Orang Kecamatan Deli

Formulir Biodata

INFORMAN KUNCI

NAMA : Febryandi Ginting S, M.Si
ALAMAT : Jl. Deli Tua Gg Sentosa Dusun VII
Desa SukaMakmur
JENIS KELAMIN : Laki-laki

USIA : 34 Tahun

JABATAN : Pemilik E-warung

INFORMAN UTAMA

NAMA : SUDARSO

ALAMAT : Jl. Ardagusema undian lingkungan V Deli Tua
Timur

JENIS KELAMIN : Laki-laki

USIA : 54 Tahun

JABATAN : TKSK

INFORMAN TAMBAHAN

NAMA : Nurlela

SUAMI : Paino Pribadi

ANAK : Nurlela Memiliki 4 anak

ALAMAT : Jl Deli Tua Pamah Gg Amri I

JENIS KELAMIN : Perempuan

USIA : 45 tahun

PEKERJAAN ISTRI : Ibu

Rumah Tangga

PEKERJAAN SUAMI : Tidak

Bekerja

INFORMAN TAMBAHAN

NAMA : Siti Heruwanah

SUAMI : Hendra Prabudi

ANAK : Siti Heruwanah Memiliki 6 Anak

ALAMAT : Jl Deli Tua Pamah Gg Tumiran

JENIS KELAMIN : Perempuan

USIA : 43 tahun

PEKERJAAN ISTRI : Ibu

Rumah Tangga

PEKERJAAN SUAMI :

Bengkel

INFORMAN TAMBAHAN

NAMA : Partiyem

SUAMI : Alm Sunar

ANAK : Partiyem Memiliki 3 orang anak

ALAMAT : Jl Deli Tua Gg Kolam

JENIS KELAMIN : Perempuan

USIA : 60 Tahun

PEKERJAAN ISTRI : Ibu

Rumah Tangga

PEKERJAAN SUAMI :

Meninggal Dunia

INFORMAN TAMBAHAN

NAMA : Rusmini

SUAMI : Suyitno

ANAK : Rusmini Memiliki 3 orang Anak

ALAMAT : Jl Deli Tua Gg aman No 38 Desa Suka Makmur

JENIS KELAMIN : Perempuan

USIA : 43 Tahun

PEKERJAAN ISTRI : Jualan

PEKERJAAN SUAMI : Bengkel Las

INFORMAN TAMBAHAN

NAMA : Trubus

SUAMI : Arjunadi

ANAK : Trubus Memiliki 2 orang anak

ALAMAT : Jl Deli Tua Gg Kolam No 17

JENIS KELAMIN : Perempuan

USIA : 46 Tahun

PEKERJAAN ISTRI : Ibu

Rumah Tangga PEKERJAAN

SUAMI : Becak

